Volume 6 Issue 1 (2023) Page : 368 - 377
SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)

Karakteristik Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

Muhammad Gibran Pradana[1*], Siti Aisyah[2]
[1,2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi demografi diketahui terdapat temuan menarik dari penelitian ini yaitu, bahwa jumlah anggota keluarga berkontribusi pada tingkap kemiskinan, dimana rumah tangga miskin cenderung memiliki angka kelahiran yang tinggi sehingga rumah tangga miskin akan cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga yang banyak. Kemudian dari segi ekonomi ditemukan bahwa hutang menjadi salah satu pengeluaran yang dominan dan membebani karena mereka harus terpaksa mengeluarkan pendapatan mereka untuk membayar hutang. Diketahui pula hutang tersebut di distribusikan sebagai biaya modal bekerja, biaya kesehatan dan pangan. Dari segi sosial tingkat pendidikan rumah tangga miskin Kabupaten Karanganyar didominasi pada tingkat SMA/SLTA Sejerajat. Dari segi kesehatan rumah tangga sudah memiliki fasilitas MCK. Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus lebih meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan membuka akses logistik, keuangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pembentukan kelompok usaha yang di sesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan dalam menghasilkan produk untuk dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Kata kunci: Rumah tingga miskin, demografi, ekonomi, PKH.

Copyright (c) 2023 Muhammad Gibran Pradana

✉ Corresponding author :
Email Address : pradanaputra628@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara umum kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar hidupnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat (BAPPENAS, 2005). Sedangkan BPS dan beberapa negara lain memakai konsep kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach) (Hernawati 2017).

Menurut Seran (2012) seseorang dikatakan miskin apabila jumlah pendapatan yang diperoleh tidak melebihi daripada garis batas kemiskinan. Menurut Arif (2010) dalam Teori Makro Ekonomi Islam menjelaskan bahwa kemiskinan lebih banyak terjadi di negara berkembang, karena pada biasanya kondisi di negara berkembang masih belum stabil dan sustainable. Word Bank (2004) mendefinikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memiliki dan memenuhi kebutuhan dasarnya

DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.3664

seperti kesehatan, standar hidup layak, dan kebebasan. Menurut Yacoub (2012) kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar hal ini dikarenakan kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar, selain itu kemiskinan merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh setiap negara.

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi. Multidimensi di sini dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek primer dan sekunder. Aspek primer meliputi miskin aset, organisasi sosial politik, dan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan ketrampilan yang rendah. Adapun aspek sekunder meliputi miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi (Arsyad, 2010). Disamping itu kemiskinan juga dikatakan sebagai permasalahan yang kompleks karena kemiskinan tidak hanya menyangkut mengenai tingkat pendapatan dan konsumsi yang rendah, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan yang buruk dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Dengan demikian dimensi kemiskinana termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, makanan, perumahan yang tidak layak, kesehatan yang kurang maksimal dan pendidikan yang rendah (Wijayanti & Wahono 2005).

Penelitian Solikatun, Masruroh, dan Zuber (2018) menemukan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain rendahnya pendapatan, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan yang buruk, kurangnya rasa percaya diri, tidak memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Menurut Abdul Hakim dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Pembangunan" menyebutkan 3 tiga faktor penyebab kemiskinan yakni, kebijakan pemerintah yang tidak tepat, distrosi harga faktor produksi, dan pengangguran penduduk berpendidikan tinggi. Pandangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang bersifat multidimensi. Sehingga permasalahan mengenai kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah di bidang pembangunan.

Berbagai kebijakan dan strategi dilaksanakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung, baik dalam skala nasional maupun lokal untuk menekan angka kemiskinan. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta mengurangi beban biaya bagi rumah tangga miskin (Mahsunah 2013). Kemudian Arsyad (2010) juga merumuskan 3 (tiga) strategi atau kebijakan yang dapat menekan angka kemiskinan yaitu, pembangunan Sumber Daya Alam (SDM), pembangunan pertanian dan perdesaan, dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Selama ini pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan tersebut dengan cara melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan. Terdapat dua strategi dalam upaya pengetasan kemiskinan yang pertama yaitu melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor. Kedua, melakukan pelatihan kepada masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Salah satu aspek penting yang dapat mendukung jalanya strategi pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang benar dan akurat. Apabila data yang tersedia tersebut benar-benar akurat maka pemerintah

DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.3664

dapat mengambil kebijakan mengenai program penanggulangan kemiskinan. Selain itu data yang tersedia dapat dijadikan pemerintah sebagai alat untuk membandingkan kemiskinan dari tahun-ketahun sehingga pemerintah dapat menyimpulkan apakah angka kemiskinan semakin meningkat atau menurun sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat. Sejalan dengan penyajian data dan prosentase penduduk miskin, profil kemiskinan juga menjadi informasi penting yang dibutuhkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan. Penelitian dari (Ferezegia, 2018) menyebutkan bahwa informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam penanganan masalah kemiskinan. Dengan demikian upaya penanganan kemiskinan dapat berjalan secara efektif, efisen, dan tepat sasaran.

Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan prosentase garis kemiskinan sebesar 9.55 % dan jumlah penduduk miskin sebanyak 84.456 jiwa, meski angka tersebut tidak lebih besar dari angka kemiskinan di Jawa Tengah namun tetap harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satu kawasan yang menjadi konsentrasi masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar adalah wilayah Kecamatan Jenawi Desa Anggramanis dimana wilayah tersebut masih berstatus sebagai wilayah tertinggal, status tersebut berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dimana desa Aggrasmanis menempati peringkat 63,278 dari seluruh desa di Indonesia dengan nilai ID 0,5505 (kemendesa.go.id).

Oleh karena itu dalam rangka memberikan kontribusi untuk menjawab permasalahan mengenai kemiskinan, maka perlu adanya penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang kemiskinan yang dilakukan dengan cara pendekatan secara langsung ke rumah tangga miskin. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifkasi karakteristik rumah tangga miskin. Sehingga melalui pendekatan tersebut dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan pemerintah dalam menaggulangi kemiskinan. Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Karanganyar dengan studi di desa Anggramas.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan survey secara langsung melalui kuisoner. Metode pengambilan sampel dilakuan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih salah satu wilayah di kab. Karanganyar yang berada dalam status wilayah tertinggal. Penelitian ini memilih Kecamatan Jenawi tepatnya di desa Anggramanis sebagai fokus lokasi penenitian. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan karena desa Aggramanis berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) masuk kedalam status tertinggal. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, berdasarkan pada perhitungan maka dibutuhkan sebanyak 120 sampel rumah tangga. Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Analisis karakterisitik rumah tangga miskin diperoleh melalui wawancara dan mengamatan terhadap variabel: 1) Data diri responden, 2) Data karakterisitik Demografi berupa jenis kelamin, usia kepala rumah tangga, 3) data karakterisitik ekonomi berupa sektor pendapatan kepala rumah tangga, tingkat pendapatan dan kesanggupan membeli

DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.3664

bahan pokok makanan 4) data karakterisitik sosial berupa tingkat pendidikan, kepemilikan fasilitas MCK dan bantuan kredit usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil kemisikinan kabupaten Karangayar

Kabupaten Karangayar terbagi atas 17 (tujuh belas) kecamatan, pada tahun 2022 Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Karanganyar diketahui sebesar 424.677 Rupiah/Kapita/Bulan. Adapun presentase penduduk miskin pada tahun 2022 diketahui sebesar 9,55 persen, dimana angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,68 persen pada tahun 2021 sehingga diketahui penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,13 persen. Angka tersebut tidak lebih besar dari angka kemiskinan di Jawa Tengah dengan prosentase 10,93 persen.

Karakteristik Demografi

Karakteristik demografi yang disajikan meliputi data presentase jenis kelamin sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga. Rumah tangga miskin akan cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga yang banyak. Hal tersebut karena rumah tangga miskin cenderung memiliki angka kelahiran yang tinggi. Dengan demikian jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumber daya di masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak (Adiana & Ni Luh, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar, ditemukan bahwa proporsi kepala rumah tangga yang menjadi fokus dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki dengan rincian sebanyak 60% rumah tangga (72) sementara kepala rumah tangga perempuan sebanyak 40% rumah tangga (48).

Dari segi usia kepala rumah tangga di Kabupaten Karanganyar bervariasi, mulai dari usia 21 tahun hingga 60 tahun dengan usia rata-rata kepala rumah tangga miskin adalah 40 tahun. Jumlah anggota rumah tangga miskin di Kabupaten Karanganyar dengan anggota keluarga > 4 orang proporsinya mencapai 90 rumah tangga (75%). Sementara rumah tangga yang memiliki jumlah anggota < 4 orang cenderung rendah yaitu 30 rumah tangga (25%). Hal ini mengindetifikasikan bahwa rumah tangga miskin di Kabupaten Karanganyar cenderung memiliki beban tanggungan yang lebih tinggi karena besarnya jumlah anggota keluarga mereka. Semakin besar jumlah anggota rumah tangga maka akan semakin besar pendapatan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, sehingga jumlah anggota yang banyak mengakibatkan kondisi semakin miskin. Hal tersebut juga sejalan dengan temuan penelitian Rivani (2004) yang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Data Karakteristik Ekonomi

Karakteristik ekonomi disajikan berupa data pendapatan, sektor pekerjaan utama dan kesanggupan membeli bahan pokok makanan. Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi suatu rumah tangga. Status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga ditentukan dari jumlah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga. Kemudian sektor pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan utama juga menetukan

DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.3664

status kemiskinan rumah tangga. Profil rumah tangga miskin sering kali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

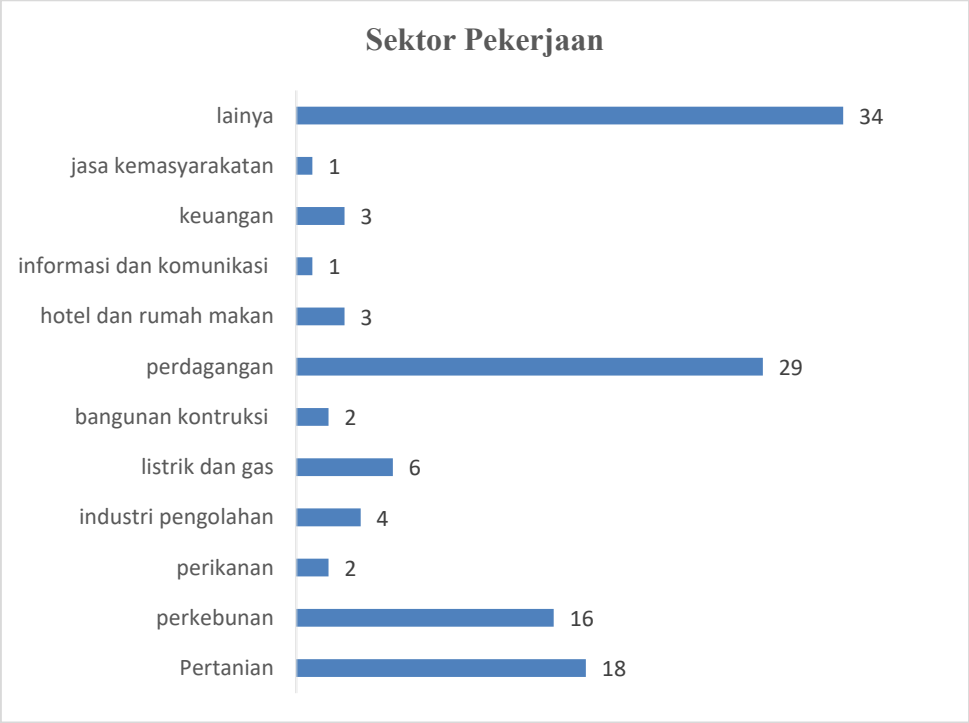

Gambar 1. Pengelompokan sektor pekerjaan utama rumah tangga miskin, Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarakan indikator pendapatan kepala rumah tangga diketahui bahwa sektor pekerjaan utama kepala rumah tangga di dominasi oleh tiga sektor dengan rincian 29 kepala rumah tangga (24,4%) sektor perdagangan, 18 kepala rumah tangga (15,1%) sektor pertanian, 16 kepala rumah tangga (13,4%) sektor perkebunan, sementara 57 kepala rumah tangga (47,1%) bekerja di berbagai sektor meliputi sektor listrik dan gas, industri pengolahan, perikanan, bangunan dan kontruksi, perikanan, jasa kemasyrakatan, keuangan dan transportasi, informasi dan komunikasi, hotel dan rumah makan, dan lainya.

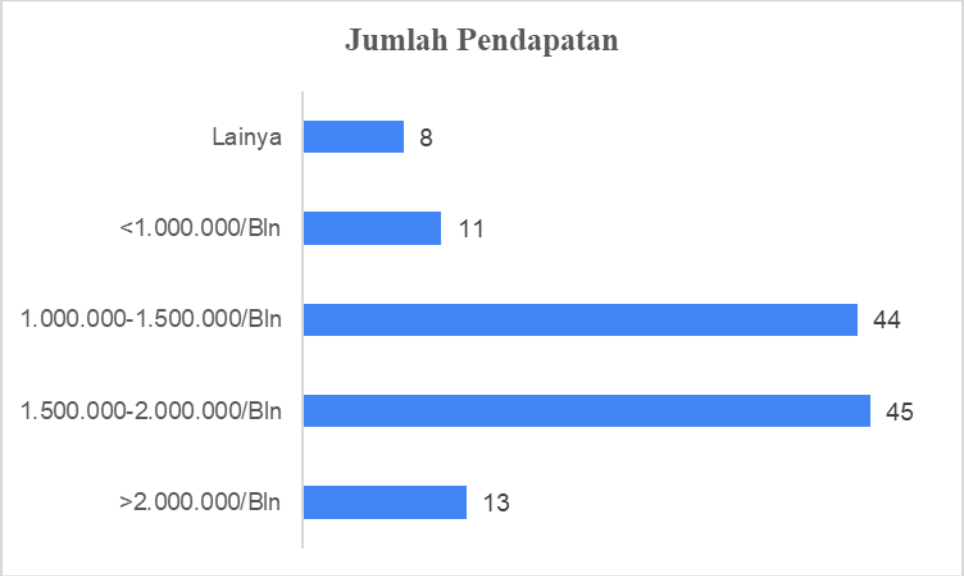

Gambar 2. Pengelompokan jumlah pendapatan

DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.3664

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarakan indikator tingkat pendapatan rumah tangga miskin kab. Karanganyar dirincikan 44 rumah tangga (37%) dengan pendapatan sebesar Rp. 1.000.000-1.500.000/bln, 45 rumah tangga (37,8%) dengan pendapatan sebesar Rp. 1.500.000-2.000.000/bln, 13 rumah tangga (10,9%) dengan pendapatan > Rp.2.000.000/bln, 10 rumah tangga (8,4%) dengan pendapatan < Rp.1.000.000/bln, 8 rumag tangga (5,9%) memilih untuk tidak menyebutkan jumlah pendapatan mereka karena alasan pribadi. Sedangkan untuk pengeluaran yang mereka keluarkan rata-rata sejumlah Rp.1.600.000/bln. Sehingga pendapatan yang mereka miliki hanya cukup untuk memenuhi keperluan pangan sehari-hari. Kemudian untuk kepemilikan hutang sejumlah 105 rumah tangga (87,5%) berhutang dan 12 rumah tangga (12,5%) tidak memiliki hutang, berdasarakan hasil wawancara

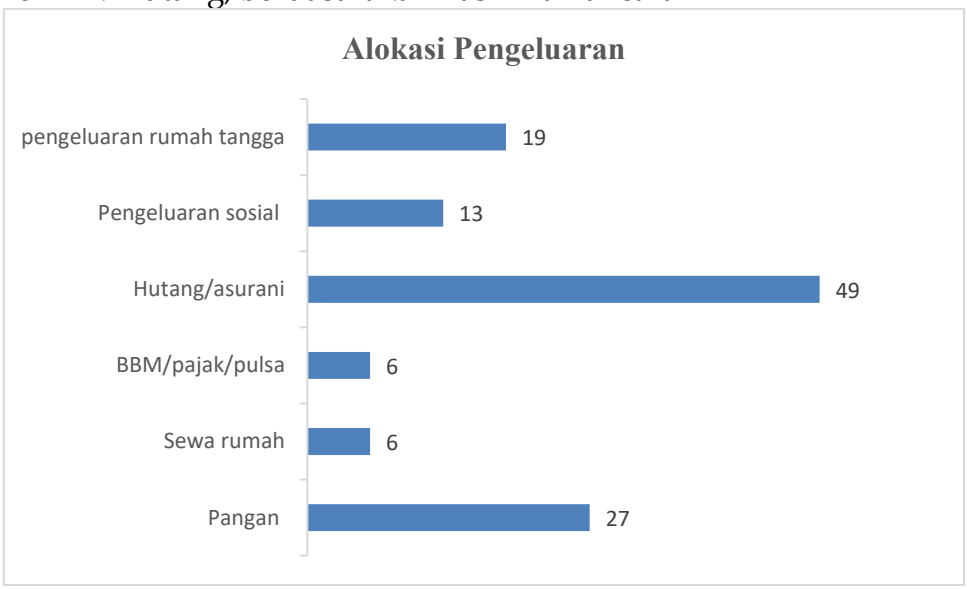

Gambar 3. Pengeluaran terbesar rumah tangga
Sumber: Data Primer, diolah

Temuan pada gambar 3 menunjukkan bahwa yang menjadi pengeluaran terbesar sebagian rumah tangga Kabupaten Karanganyar adalah membayar hutang atau asuransi. Berdasarkan hal tersebut kemudian analisis dilanjutkan dengan melihat keperluan apa yang mendorong rumah tangga miskin Kabupaten Karanganyar untuk berhutang.

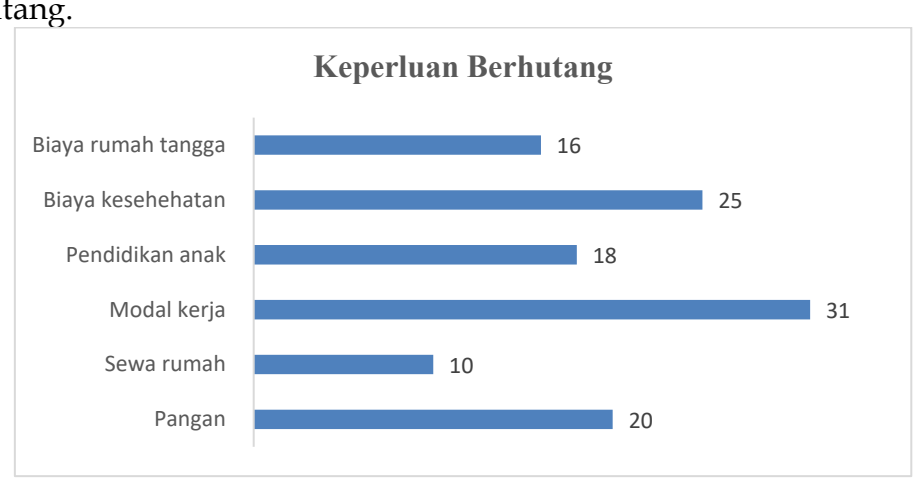

Gambar 4. Keperluan berhutang rumah tangga miskin Kab. Kanganyar
Sumber: Data Primer, diolah

DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.3664

Pada gambar 4 menunjukkan bahwa distribusi keperluan berhutang di dominasi oleh keperluan modal kerja, kemudian disusul secara berturut-turut yaitu kebutuhan biaya kesehatan, biaya pangan, biaya pendidikan anak, biaya rumah tangga dan terakhir adalah baiaya sewa rumah. Biaya modal kerja sebagai alokasi peminjaman hutang ini sesuai dengan sektor pekerjaan utama dari rumah tangga Kabupaten Karangayar yang di dominasi oleh sektor perdagangan. Dimana berdasarkan wawacara yang dilakukan rumah tangga memelih berhutang sebagi modal untuk membangun usaha.

Berdasarakan indikator kesanggupan membeli bahan pokok makanan rumah tangga miskin Kabupaten Karanganyar diketahui bahwa setiap rumah tangga rata-rata dapat makan 3 kali dalam sehari. Namun, tidak semua rumah tangga mampu membeli daging, susu dan roti sebagai bahan konsumsi rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan pendapatan mereka hanya cukup untuk membeli bahan pokok makanan seperti ayam, telur, ikan, sayur dan buah.

a. Data karakteristik sosial

Data karakteristik sosial disajikan berupa data tingkat pendidikan, kepemilikan fasilitas MCK dan penerimaan bantuan kredit usaha. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu hubungan anatara pendidikan dengan kemiskinan juga sangat penting, karena pendidikan berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Menurut Rizal (2015) Orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih baik akan cenderung berpeluang untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi persyarata kesehatan. Rumah yang sehat tentunya akan memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah. Kepemilikan fasilitas MCK adalah salah satu indikator yang menunjukkan rumah sehat. Ketersediaan fasilitas MCK dalam setiap rumah tangga mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga.

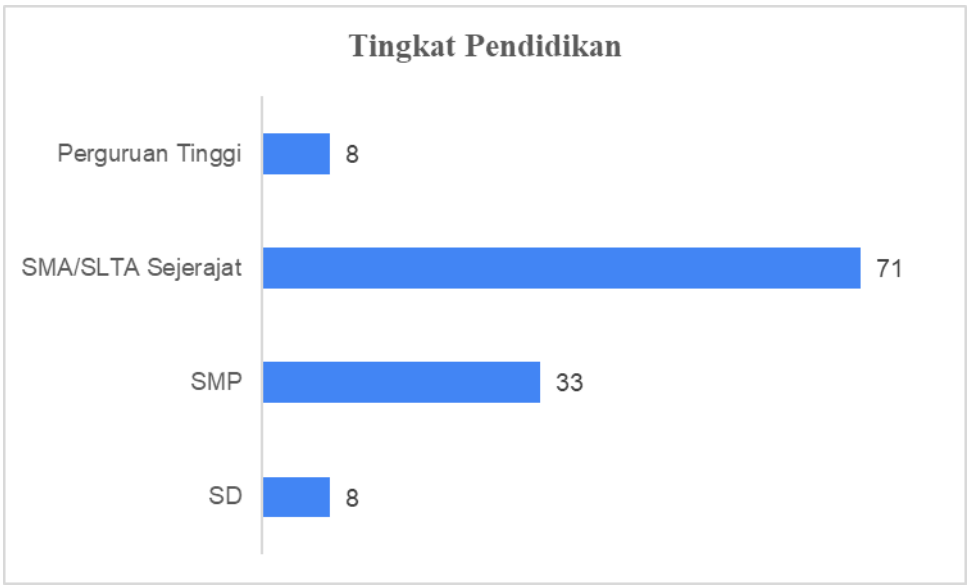

Gambar 3. Pengelompokan tingkat pendidikan
Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarakan hasil penelitian, indikator tingkat pendidikan diperoleh bahwa hampir semua rumah tangga pernah duduk di bangku sekolah namun, rumah tangga miskin cendurungan memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu SD (5,9%), SMP

DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.3664

(27,7%), SMA/SLTA sederajat (59,7%), dan perguruan tinggi (6,7%) (Gambar 3). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga miskin memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian mereka yang tergolong cukup sulit sehingga tidak memiliki biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga masih sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada sulitnya mencari pekerjaan dengan posisi dan gaji yang tinggi (Suryadi et al.,2010).

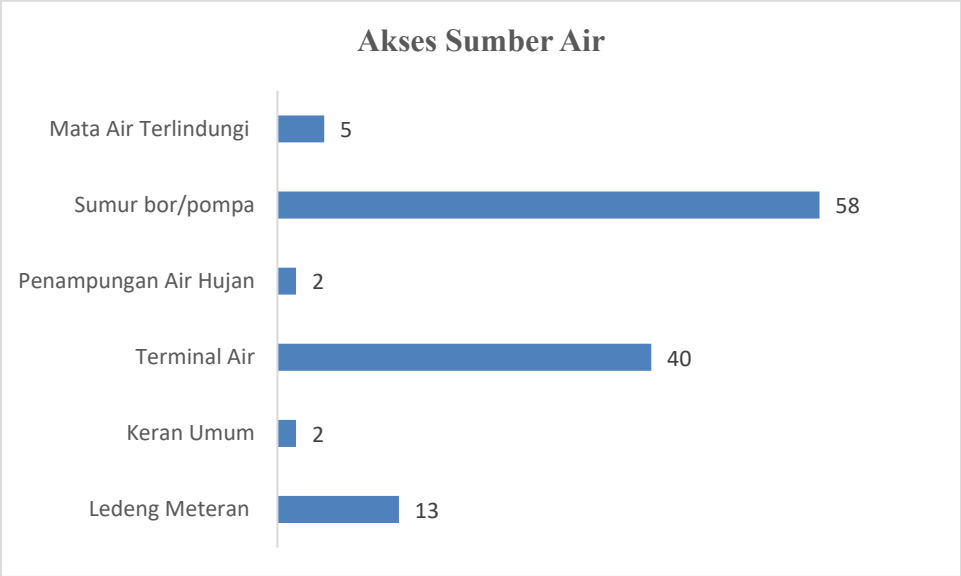

Gambar 4. Pengelompokan akses sumber air
Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarakan indikator kepemilikan fasilitas MCK, maka rumah tangga miskin di kab.Karangayar diketahui hampir semua rumah tangga memiliki fasilitas MCK dengan proporsi sebesar 110 rumah tangga (92,4%) memiliki fasilitas MCK, sedangkan 10 rumah tangga (7,6%) masih belum memiliki fasilitas MCK. Untuk akses sumber air, rumah tangga miskin di Kabupaten Karanganyar masih memanfaatkan sumur bor/pompa dengan proporsi 58 rumah tangga (48,3%), terminal air sebanyak 40 rumah tangga (33,3%), ledeng meteran sebanyak 13 rumah tangga (10,8%), namun masih ada juga rumah tangga yang memanfaatkan mata air alami dan air hujan sebagai akses sumber air dengan proporsi sebanyak 7 rumah tangga (5,9%) (Gambar 4). Pemilihan sumur/bor sebagai akses sumber air rumah tangga di Kabupaten Karanganyar karena kondisi perumahan yang belum padat sehingga kondisi tersebut memudahkan untuk membuat sumur.

Berdasarkan indikator bantuan kredit usaha sejumlah 96 rumah tangga (80%) menerima bantuan kredit usaha dan sejumlah 24 rumah tangga (20%) tidak menerima bantuan kredit usaha. Bantuan kredit usaha yang diterima berasal dari KUR BRI serta BPD Jateng. Adapaun alasan sejumlah rumah tangga tidak menerima bantuan kredit usaha yaitu karena, rumah tangga tidak memenuhi kriteria administratif serta rumah tangga sudah terdaftar sebagai penerima bantuan lain.

SIMPULAN

Berdasarakan hasil analisis penelitian yang dilakukan pada rumah tangga miskin penerima PKH di Kabupaten Karangayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari

DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.3664

segi demografi diketahui terdapat temuan menarik dari penelitian ini yaitu, bahwa jumlah anggota keluarga berkontribusi pada tingkap kemiskinan, dimana rumah tangga miskin cenderung memiliki angka kelahiran yang tinggi sehingga rumah tangga miskin akan cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga yang banyak. Kemudian dari segi ekonomi ditemukan bahwa hutang menjadi salah satu pengeluaran yang dominan dan membebani karena mereka harus terpaksa mengeluarkan pendapatan mereka untuk membayar hutang. Diketahui pula hutang tersebut di distribusikan sebagai biaya modal bekerja, biaya kesehatan dan pangan. Dari segi sosial tingkat pendidikan rumah tangga miskin Kabupaten Karanganyar didominasi pada tingkat SMA/SLTA Sejerajat. Dari segi kesehatan rumah tangga sudah memiliki fasilitas MCK. Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus lebih meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan membuka akses logistik, keuangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pembentukan kelompok usaha yang di sesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan dalam menghasilkan produk untuk dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Referensi :

Adiana, & Ni Luh, K. (2012). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga, Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,* 1(1),39–48.

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Word Bank. (2004). Definisi Kemiskinan. http://www.wordbank.org. Diakese pada tanggal 20 oktober 2022.

BAPPENAS. (2005). Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi. https//bappenas.go.id. Diakses pada tanggal 20 oktober 2022.

Bastiana, Namjudin & Rusman, R. (2019). Analisis Karakteristik Rumah Tangga Miskin Di Wilayah Pusat Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Seminar Nasional Lembaga Penelitian UNM* , 1(1), 34–48.

Sulistyo, B. & Hadi, S. (2012). Analisis Kemiskinan Berdasarkan Karakteristik Rumah Tangga, Faktor Komunitas Dan Karakteristik Wilayah Di Kecamatan Gunungpati Semarang. *Diponegoro Journal of Economi*, 1(1), 1–6.

Haryanto, T., Angga, E., & Verliana, R. (2020). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* 9(2), 89–105.

Ferezegia, D. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan,* 4(1), 1–6.

Hernawati, I. (2017). Pengukuran Konstrak Kemiskinan Di Indonesia The Measurement of Poverty Construct in Indonesia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial,* 41(3), 269–84.

Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Yogyakarta: YKPN.

Rianto, N. (2010). *Teori Makro Ekonomi Islam*. bandung: alfabeta.

Mahsunah, D. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE),* 1(3), 1–17.

Miftahuddin. (2011). Analisa Karakteristik Rumah Tangga Miskin Dengan Metode Regresi Logistik Terbaik. *Jurnal Matematika, Statistika, Dan Komputasi,* 7(2), 79–91.

Nopriansyah, Junaidi, & Etik, U. (2015). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga Di

DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.3664

Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah,* 2(3), 119–28.

Rasyid, R., dkk. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Status Kemiskinan Rumah Tangga Pada Wilayah Central Bussiness District (CBD) Di Kota Makassar. *Majalah Geografi Indonesia,* 34(1), 43-52.

Rivani, A. (2003). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kuatai Kartanegara. *Tesis Megister Ilmu Ekonomi UNHAS, Makassar*.

Rizal, R. (2015). Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia?. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(1), 15–30.

Royat, S. 2015. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. jakarta: Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Salam, A., Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2020). In Depth Poverty Analysis in East Java From a Multidimensional Perspective. Atlantis Press, 144(16), 338-343.

Seran, S. (2012). Determinan Faktor Sosial Dan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Penduduk. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan,* 13(1), 62-76

Servinda, Ichan, & Dewi, Z. (2018). Karakteristik Rumah Tangga Miskin Perkotaan Dan Pedesaan Di Sumatra Barat. *Journal EcoGen* 1(3), 673–80.

Setiawina, N. D., Lestari, N., & Suidarama, I. A. (2014). Mapping And Strategies For Locale Specific-Based Poverty Alleviation In Tabanan Regency, Bali Province. *Journal of Rural,* 2(1), 68-80

Sihombing, P., & Ade, M. (2020). Do Internal Household Factors Affect Poverty Status ? Evidence From Indonesia. *Journal of Management Science (JMAS),* 3(2), 58–64.

Solikatun, Yulia, M., & Ahmad, Z. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi* 3(1), 70-90

Sugiharti, L. (2017). The Determinants of Poverty: Case of Indonesia. *Global Journal of Business and Social Sience Review*, 5(3), 58–68.

Utariyanto, Gustin, R., Ketut, S., & Septri, W. (2020). Determinant Factors of the Household Poverty Probability: Study on Household around the Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Lebong Regency. *AGRITROPICA : Journal of Agricultural Sciences* 3(1), 29–37.

Wijayanti, Diana, and Heri, W. (2005). Analisis Konsentrasi Kemiskinan Di Indonesia Periode 1999-2003. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 215–25.

Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. 8(3), 176–85.

Yani, Winda, & Gusti, I. (2018). Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Kepala Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,* 7(3), 381–415.